



**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM
KAMPUNG KERAJINAN BAMBUR DAN ROTAN (KRABATAN)
DI KELURAHAN PAKINTELAN KOTA SEMARANG**

Skripsi

Untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan pada Prodi PPKn

Dosen Pembimbing:

Drs. Tijan, M.Si

Oleh

Risista Ratri Rahayu

3301416045

**PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TAHUN 2020**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Senin

Tanggal : 27 April 2020

Pembimbing Skripsi I



Drs. Tijan, M.Si.

NIP. 196211201987021001

Mengetahui:

Ketua Jurusan/Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan



Drs. Tijan, M.Si.

NIP. 196211201987021001

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Senin

Tanggal : 4 Mei 2020

Penguji I

Prof. Dr. Masrukhi, M.Pd

NIP. 196205081988031002

Penguji II

Novia Wahyu Wardhani, S.Pd., M.Pd.

NIP. 196211201987021001

Penguji III

Drs. Tijan, M.Si.

NIP. 198811022015042001

Mengetahui,

Dekan FIS UNNES

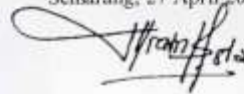
Dr. Mbh. Solehatul Mustofa, M.A.

NIP. 196308021988031001

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat di dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, 27 April 2020



Risista Ratri Rahayu

NIM. 3301416045

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

- *Berdoalah kepadaKu pastilah Aku kabulkan untukmu. (Q.S Al-Mukmin:60)*
- *Salah satu kunci kebahagiaan adalah menggunakan uangmu untuk pengalaman bukan untuk keinginan. (B.J Habibie)*

PERSEMBAHAN:

Bismillahirrohmanirrohim, dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, saya persembahkan karya ini untuk:

1. Kedua orangtua saya Bapak Totok Sunarto dan Ibu Dewi Rahayu yang telah bekerja keras, memberikan kasih sayang, semangat dan motivasi yang tulus serta doa hingga pencapaian saya saat ini.
2. Kakak pertama saya Kristine Sunarwati yang tidak henti-hentinya memberikan dukungan, bantuan, semangat, nasehat dan doa sehingga saya mampu menyelesaikan kuliah.
3. Kakak kedua saya Twin Wihanarti yang telah memberikan mendukung dan doa untuk saya.
4. Sahabat satu atap saya selama 3 tahun terakhir Meita Setyorini, Nurul Khasanah, Feni Angraheni, Winar Afitriani dan Hartiana Putri yang telah membantu segala kesulitan saya, merawat saat saya sakit, dan mengukir kisah persahabatan di kota perantauan.

5. Teman spesial yang telah banyak membantu saya sejak semester awal hingga saat ini.
6. Teman satu bimbingan Putri, Eva, Intan, dan Pita yang telah berjuang bersama dan saling membantu selama proses penyusunan skripsi.
7. Keluarga besar Harjowiyoso khususnya sepupu saya Joko Supriyanto, yang senantiasa memberi support dan doa.
8. Teman-teman Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Semarang tahun 2016.
9. Rekan-rekan seperjuangan di Gugus Latih Ilmu Sosial.
10. Teman-teman PPL di SMA N 8 Semarang.
11. Teman-teman KKN Lokasi Tahap II Desa Lolong, Karanganyar, Pekalongan
12. Sahabat-sahabat hangout yang selalu memberikan support.
13. Sahabat Dewan Ambalan Kamajaya Dewiratih angkatan 24 SMA N 1 Jogonalan.

PRAKATA

Assalamualikum, Wr.Wb

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul: “Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Kampung Kerajinan Bambu dan Rotan (KRABATAN) di Kelurahan Pakintelan Kota Semarang”.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S1) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada Jurusan Politik dan Kewarganegaraan di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. Penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Bapak Dr. Moh. Solehatul Mustofa, M.A., Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.
3. Bapak Drs. Tijan, M.Si., Ketua Jurusan Politik dan Kewarganegaraan dan Dosen Pembimbing yang telah dengan sabar membimbing, mengarahkan, menasehati, dan memotivasi dalam penulisan skripsi.
4. Segenap bapak dan ibu dosen Jurusan Politik dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang

5. Seluruh Perangkat Kelurahan Pakintelan, Paguyuban KRABATAN, serta seluruh pihak yang terkait dalam pemberdayaan masyarakat melalui program Kampung Kerajinan Bambu dan Rotan (KRABATAN) yang telah meluangkan waktu dan membantu memberikan data dalam penelitian.
6. Kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memotivasi dan membantu sehingga penulisan skripsi dapat diselesaikan.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah khasanah keilmuan bagi penulis sendiri dan bagi pembaca.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Semarang, 27 April 2020

Penyusun

SARI

Rahayu, Risista Ratri, 2020. *Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Kampung Kerajinan Bambu dan Rotan di Kelurahan Pakintelan Kota Semarang.* Skripsi. Jurusan Politik dan Kewarganegaraan. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Drs. Tijan, M.Si. 134 halaman

Kata kunci: Pemberdayaan masyarakat, kampung KRABATAN, kesejahteraan sosial

Kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang ada diberbagai daerah. Tingginya angka kemiskinan dikarenakan kondisi masyarakat yang tidak berdaya, hal ini dapat berdampak kepada kualitas hidup masyarakat. Kampung Kerajinan Bambu dan Rotan (KRABATAN) merupakan program yang disusun oleh pemerintah Kelurahan Pakintelan sebagai wujud dilaksanakannya himbauan Walikota Semarang untuk membuat kampung tematik. Kampung KRABATAN diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan perekonomiannya, dengan memberikan daya kepada masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah Kelurahan Pakintelan melalui program Kampung KRABATAN dan faktor yang mendukung serta menghambat terlaksananya pemberdayaan masyarakat melalui program Kampung Kerajinan Bambu dan Rotan (KRABATAN) di Kelurahan Pakintelan Kota Semarang.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang dilakukan di Kelurahan Pakintelan Kota Semarang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Terdapat dua sumber data yaitu primer dan sekunder. Alat yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah pedoman wawancara, alat dokumentasi, dan lembar observasi. Uji validitas data menggunakan teknik triangulasi sumber. Analisis data yang digunakan adalah model interaktif dengan tahapan mengumpulkan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan di Kelurahan Pakintelan melalui program Kampung KRABATAN. 1) pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan memberikan pembekalan pengetahuan dan keterampilan kepada masyarakat melalui kegiatan pelatihan membuat kerajinan bambu dan rotan; 2) Program Kampung Kerajinan Bambu dan Rotan dibentuk untuk memperdayakan masyarakat Kelurahan Pakintelan terutama para pengrajin bambu dan rotan dan masyarakat golongan menengah kebawah; 3) program Kampung KRABATAN merupakan wujud dari himbauan Walikota Semarang untuk membentuk kampung tematik dengan mengembangkan potensi wilayah; 4) pemerintah kelurahan membentuk Paguyuban KRABATAN untuk melibatkan masyarakat secara aktif; 5) dampak dari pemberdayaan yaitu meningkatnya kualitas diri pada masyarakat, seperti berkembangnya keterampilan masyarakat dalam mengayam bambu dan rotan sehingga saat ini pemasaran hasil kerajinan sudah menembus pasar internasional. Pelaksanaan pemberdayaan saat ini

belum dapat diselenggarakan secara optimal karena pemerintah kelurahan terhambat masalah pembiayaan untuk keperluan pengembangan keterampilan dan pengetahuan masyarakat. Faktor pendukung dan penghambat pemberdayaan masyarakat melalui program Kampung KRABATAN. Faktor pendukung pemberdayaan (1) sumber daya manusia (SDM); (2) sumber daya alam (SDA); (3) dukungan pemerintah daerah; (4) kerjasama dengan berbagai mitra; dan (5) Respon positif masyarakat. Faktor penghambat pemberdayaan masyarakat (1) keterbatasan modal; (2) intensitas pelatihan yang kurang; dan (3) rendahnya partisipasi generasi muda; (4) pemasaran kurang optimal.

Saran, perlu adanya peningkatan pemberdayaan dengan menambah intensitas pelatihan dan mengembangkan materi pelatihan oleh pemerintah Kelurahan Pakintelan agar masyarakat semakin berdaya. Sedangkan untuk pemerintah daerah hendaknya dapat memberikan plafon kredit wibawa yang lebih tinggi agar dapat mencukupi kebutuhan modal pengrajin bambu dan rotan di Kampung KRABATAN. Selain itu, perlu adanya peningkatan peran generasi muda di Kelurahan Pakintelan sebagai generasi milenial yang menguasai teknologi. Hal ini mampu membantu pemerintah untuk mengembangkan eksistensi dan pemasaran produk Kampung KRABATAN.

ABSTRACT

Rahayu, Risista Ratri, 2020. Empowering Kampung Kerajinan Bambu dan Rotan (KRABATAN) Program in Pakintelan Semarang. Thesis. Politics and Civics Department. Faculty of Social Sciences. Semarang State University. Supervisor Drs. Tijan, M.Sc. 133 page

Keywords: Empowerment, KRABATAN program, social welfare

Poverty is a social problem that exists in various regions. The high poverty rate is due to the helpless condition of the community, this can have an impact on the quality of life of the community. The Kampung Kerajinan Bambu dan Rotan (KRABATAN) is a program created by the government as an appeal execution of the mayor of Semarang city to develop thematic village. The KRABATAN program is expected to improve the quality of life and economy, by providing power to the community through community empowerment activities. This study aimed to determine the implementation of community empowerment carried out by the government through the KRABATAN program and factors that support and hinder the implementation of community empowerment through the Bamboo and Rattan Craft Village (KRABATAN) program in Pakintelan Village, Semarang City.

The research method used in this study is a qualitative research method conducted at Pakintelan village, Semarang City. Data collection techniques used were interviews, observation, and, documentation. There are two data sources namely primary and secondary. The tools used to collect data are interview guides, documentation tool, and observasi sheets. Test data validity using source triangulation techniques. Analysis of the data used is an interactive models with stages of data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing.

The results of the community empowerment held in Pakintelan village through the Kampung Kerajinan Bambu dan Rotan (KRABATAN) program showed that (1) community empowerment is done by providing knowledge and skills to the community through training activities in making bamboo and rattan crafts; (2) The Bamboo and Rattan Crafts Village Program was formed to empower the people of the Village of Pakintelan, especially the bamboo and rattan craftsmen and the middle class and below; (3) the KRABATAN program was an execution of mayor of Semarang city appeal to develop a thematic village by exploring the regional potential; (4) the government established a committee group of the KRABATAN program to involve the community actively (5) the impact of the empowerment was to improve the quality of the community, such as the development of community skills in crafting bamboo and rattan so that the current marketing of these handicrafts had penetrated the international market. The implementation of the empowerment could not be carried out optimally at this time because the village government was lack of finance to develop the skills and knowledge. Inhibiting factors of the community empowerment were (1) limited capital; (2) lack of training intensity; (3) low participation of young generation; and (4) non-optimal marketing.

The suggestion related to this research is an increase in training intensity and materials development by the village government of Pakintelan to encourage the community. Meanwhile, the government should be able to provide a higher wibawa credit ceiling to meet the capital requirements of bamboo and rattan craftsmen in KRABATAN Village. In addition, the role of the young generation needs to be increased as millennials who master technology nowadays. It is able to help the government to develop the existence of KRABATAN village so that it can be widely known by the public and product marketing.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN.....	iii
PERNYATAAN	iv
MOTO DAN PERSEMBAHAN	v
PRAKATA	vii
SARI	ix
ABSTACT	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR BAGAN	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Batasan Istilah.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Deskripsi Teoritis	9
B. Penelitian yang Relevan	35
C. Kerangka Berpikir	38
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Latar Penelitian	40
B. Fokus Penelitian	42
C. Sumber Data	44
D. Alat dan Teknik Pengumpulan Data	46

E. Uji Keabsahan Data	49
F. Teknik Analisis Data	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	55
B. Pembahasan	113
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	
A. Simpulan	134
B. Saran	135
DAFTAR PUSTAKA	136

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Pergeseran Paradigma Pembangunan Masyarakat	10
Tabel 2.2. Tahapan dalam Siklus Pemberdayaan Masyarakat	23
Tabel 2.3. Metode Pemberdayaan Masyarakat.....	25
Tabel 3.1 Daftar Nama Informan.....	45
Tabel 4.1 Data Tingkat Pendidikan Kelurahan Pakintelan tahun 20018	58
Tabel 4.2 Data Warga Miskin Kelurahan Pakintelan	69
Tabel 4.3 Jenis Mata Pencarian Masyarakat Pakintelan	71
Tabel 4.4 Dana Pembangunan Kampung KRABATAN	78

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Kerangka Berpikir Penelitian	39
Bagan 3.1 Komponen dalam Analisis Data	54
Bagan 4.1 Struktur Organisasi Paguyuban KRABATAN	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Peta Kelurahan Pakintelan	55
Gambar 4.2 Bapak Ahmad Sholeh Ketua Paguyuban KRABATAN	62
Gambar 4.3 Gapura Kampung Kerajinan Bambu dan Rotan	64
Gambar 4.4 Showroom KRABATAN	65
Gambar 4.5 Hasil Karya Masyarakat Pakintelan	66
Gambar 4.6 Pengrajin Bambu di Kelurahan Pakintelan	72
Gambar 4.7 Pelatihan Narasumber Ketua Paguyuban	75
Gambar 4.8 <i>Marketplace</i> Produk KRABATAN	76
Gambar 4.9 Plang Petunjuk Arah Kampung KRABATAN	80
Gambar 4.10 Peta Lokasi Kampung KRABATAN	80
Gambar 4.11 Rapat Koordinasi Bersama Tokoh Masyarakat	84
Gambar 4.12 Pelatihan Kerajinan Bambu dan Rotan	90
Gambar 4.13 Hasil Pelatihan KRABATAN	91
Gambar 4.14 Monitoring Pemerintah Kelurahan di <i>Home</i> Industri rotan	92
Gambar 4.15 Monitoring Pemerintah Kelurahan di <i>Home</i> Industri bambu..	94
Gambar 4.16 Instagram Kampung KRABATAN	94
Gambar 4.17 Koleksi Kerajinan Bambu dan Rotan	100
Gambar 4.18 Anyaman Bambu dan Rotan Kanguru	101
Gambar 4.19 Kerajinan Bambu Capung	102
Gambar 4.10 Kerajinan Tampah Kelurahan Pakintelan	103
Gambar 4.21 Proses Pembuatan Pesanan Anyaman Kanguru dari Australia.....	104
Gambar 4.22 Tanaman Bambu di Kelurahan Pakintelan	107

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Instrumen Penelitian	141
Lampiran 2. Hasil Wawancara	158
Lampiran 3. Pedoman Observasi	189
Lampiran 4. Pedoman Dokumentasi	190
Lampiran 5. Surat Rekomendasi Penelitian	192
Lampiran 6. Surat Keputusan Dosen Pembimbing	193
Lampiran 7. Peraturan Walikota Semarang Nomor 22 tahun 2018.....	194
Lampiran 8. Peraturan Walikota Semarang Nomor 57 tahun 2018.....	206
Lampiran 9. Dokumen Bappeda Kota Semarang	211

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kota Semarang merupakan ibu kota Provinsi Jawa Tengah, kota ini disebut juga sebagai kota metropolitan terbesar kelima di Indonesia. Kota Semarang sebagai salah satu kota berkembang di Jawa Tengah memiliki jumlah penduduk yang cukup padat. Kota Semarang sama halnya seperti kota metropolitan lainnya yang dijadikan tujuan masyarakat untuk mencari pekerjaan dan memperoleh pelayanan publik yang lebih baik. Fasilitas publik yang memadai, perkembangan iptek yang pesat, dan banyaknya pusat perindustrian di Kota Semarang menjadi alasan banyaknya masyarakat pendatang di kota ini. Daya tarik yang dimiliki Kota Semarang dan tingkat kepadatan penduduk di kota ini menimbulkan munculnya berbagai permasalahan sosial, terutama masalah kemiskinan dan pengangguran.

Permasalahan kemiskinan dan pengangguran merupakan permasalahan sosial yang sering ditemukan di berbagai wilayah termasuk di Kota Semarang. Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) menunjukkan bahwa persentase pengangguran di Kota Semarang saat ini mencapai 5,29% (Antoni,2019). Selain itu, tercatat pula tingkat penduduk miskin di Kota Semarang pada jangka tahun 2011-2018 sebesar 4,14% yaitu sebanyak 73.650 jiwa (Badan Pusat Statistik, 2018). Kondisi ekonomi dan sosial yang menunjukkan angka kemiskinan dan pengangguran cukup tinggi di kota ini maka diperlukan adanya upaya perubahan.

Guna menangani permasalahan diatas, pemerintah daerah Kota Semarang menyusun kebijakan penanggulangan kemiskinan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 tahun 2016 yaitu tentang Penanggulangan Kemiskinan Kota Semarang. Arah kebijakan pemerintah daerah yaitu dengan membuat program penanggulangan kemiskinan. Program yang dimaksud meliputi kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan makro, serta kegiatan-kegiatan lain baik secara langsung maupun tidak langsung. Salah satu kegiatan unggulan yang mendukung pelaksanaan penanggulangan kemiskinan Kota Semarang yaitu program kampung tematik.

Kampung tematik merupakan salah satu wujud dari program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin. Peraturan Walikota Semarang Nomor 22 tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan kampung tematik menjelaskan bahwa indikator pembentukan kampung tematik yaitu mengutamakan wilayah yang memiliki angka kemiskinan tinggi, memiliki potensi yang dapat dikembangkan, masyarakat berpartisipasi aktif, dan adanya permasalahan sosial yang mendesak untuk ditangani. Kemudian untuk anggaran pelaksanaan pembentukan kampung tematik bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD) dan juga bersumber dari tanggungjawab sosial perusahaan atau swadaya masyarakat.

Sasaran pembentukan kampung tematik merupakan seluruh kelurahan yang ada di Kota Semarang. Badan Pusat Statistik Kota Semarang mencatat secara administratif kota ini memiliki 16 kecamatan dan 177 kelurahan dengan kepadatan penduduk sebanyak 1,79 juta jiwa (BPS,2019). Dimana setiap kecamatan dan kelurahan tersebut memiliki ciri khas dan keberagamannya. Pembentukan kampung tematik dilaksanakan secara bertahap yaitu pada tahun 2016 terdapat 32 kelurahan, tahun 2017 terdapat 80 kelurahan, dan pada tahun 2018 terdapat 65 kelurahan yang menjadi kampung tematik. Oleh sebab itu, pada tahun 2018 di Kota Semarang telah memiliki 177 Kampung Tematik yang artinya satu kelurahan terdapat satu kampung tematik berdasarkan potensi masing-masing daerah (Bappeda,2017).

Kelurahan Pakintelan merupakan salah satu kelurahan yang ada di Kota Semarang. Pada tahun 2018 Kelurahan Pakintelan telah ditetapkan oleh Walikota Semarang sebagai salah satu Kampung Tematik yang ada di Kota Semarang. Berdasarkan hasil observasi awal pada tanggal 20 September 2019 latar belakang ekonomi masyarakat Kelurahan Pakintelan sebagian besar merupakan golongan menengah kebawah. Tingkat pendidikan masyarakat di Kelurahan Pakintelan masih tergolong rendah. Kemudian mata pencarian masyarakat ini mayoritas juga sebagai buruh. Jadi tingkat masyarakat golongan lemah di kelurahan ini masih cukup tinggi. Sedangkan, sesungguhnya Kelurahan Pakintelan memiliki potensi sumber daya manusia yang sangat

unggul yaitu keterampilan masyarakat dalam membuat kerajinan bambu dan rotan. Potensi yang unggul tersebut kemudian dikemas oleh pemerintah kelurahan sebagai salah satu terobosan program kampung tematik di Kota Semarang.

Potensi yang diusung Kelurahan Pakintelan sebagai tema kampung tematik yaitu kemampuan masyarakat dalam membuat kerajinan bambu dan rotan. Berdasarkan pada potensi yang ada di daerah tersebut maka dibentuklah Kampung Kerajinan Bambu dan Rotan yang kemudian akrab dengan sebutan Kampung KRABATAN. Alasan dibentuknya Kampung KRABATAN selain karena adanya himbauan Walikota untuk mengembangkan potensi lokal, juga untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat di Kelurahan Pakintelan.

Kampung Kerajinan Bambu dan Rotan (KRABATAN) merupakan program yang dibentuk oleh pemerintah kelurahan. Tujuan program ini agar dapat mendorong perekonomian masyarakat dan mengangkat kearifan lokal dengan mengelola potensi yang dimiliki. Kemampuan masyarakat membuat kerajinan bambu dan rotan yang merupakan warisan turun temurun. Metode yang digunakan pemerintah kelurahan dalam pelaksanaan program tersebut yaitu dengan melaksanakan pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya perubahan yang tepat untuk mengurangi permasalahan sosial. Dimana pemberdayaan masyarakat diimplementasikan dengan melibatkan masyarakat secara aktif, memberikan bekal kemampuan, kreativitas, dan pengetahuan sehingga masyarakat menjadi memiliki daya atau *power*. Pemberdayaan masyarakat dirancang agar dapat

menciptakan kondisi masyarakat yang sejahtera. Hal ini disebabkan karena melalui pemberdayaan, masyarakat menjadi mandiri dan mampu berinovasi. Selain itu, kegiatan pemberdayaan masyarakat juga dapat diselenggarakan di berbagai sektor baik itu sektor pertanian, perdagangan, perindustrian, kerajinan, maupun perkebunan.

Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Pakintelan melalui program Kampung Kerajinan Bambu dan Rotan (KRABATAN) memberikan akses kepada masyarakat untuk dapat melakukan perubahan kualitas hidup. Masyarakat menjadi mampu menciptakan lapangan kerja dan terpenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya secara mandiri. Ketidakberdayaan masyarakat yang sering ditemui terjadi akibat kurangnya pengetahuan dan keterampilan yang dialami masyarakat serta keterbatasan pengetahuan. Oleh sebab itu, dengan melibatkan masyarakat secara aktif melalui program Kampung KRABATAN (Kerajinan Bambu dan Rotan) mampu menjadi wadah bagi masyarakat setempat untuk mengembangkan potensi diri guna melakukan perubahan dalam segala segi kehidupan baik itu dalam bidang ekonomi maupun sosial. Paradigma pemberdayaan masyarakat inilah yang membuktikan perlu adanya meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menjadikan masyarakat yang sejahtera.

Dari latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk meneliti **Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Kampung Kerajinan Bambu dan Rotan (KRABATAN) di Kelurahan Pakintelan Kota Semarang.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang tersebut, maka penulis kemudian melakukan identifikasi masalah. Dari identifikasi masalah tersebut penulis memperoleh rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui program Kampung Kerajinan Bambu dan Rotan (KRABATAN) di Kelurahan Pakintelan Kota Semarang?
2. Apa sajakah faktor yang menghambat dan mendukung terlaksananya pemberdayaan masyarakat dalam program Kampung Kerajinan Bambu dan Rotan (KRABATAN) di Kelurahan Pakintelan Kota Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian tentang pemberdayaan masyarakat melalui program Kampung Kerajinan Bambu dan Rotan (KRABATAN) di Kelurahan Pakintelan Kota Semarang ini untuk mendeskripsikan:

1. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam program Kampung Kerajinan Bambu dan Rotan (KRABATAN) di Kelurahan Pakintelan Kota Semarang;
2. faktor yang menghambat dan mendukung terlaksananya pemberdayaan masyarakat dalam program Kampung Kerajinan Bambu dan Rotan (KRABATAN) di Kelurahan Pakintelan Kota Semarang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai sarana penerapan teori yang didapat di perguruan tinggi serta hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperkuat dan mengembangkan teori yang sudah ada, serta dapat dijadikan acuan penelitian-penelitian lain yang mempunyai obyek penelitian yang sama.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Kelurahan Pakintelan

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan saran kepada Pemerintah Kelurahan Pakintelan untuk mengatasi hambatan dan kekurangan dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan. Penelitian ini dapat menjadi wadah publikasi adanya Kampung Kerajinan Rotan dan Bambu (KRABATAN).

b. Bagi Pemerintah Daerah

Melalui penelitian ini diharapkan mampu memberikan saran kepada Pemerintah Daerah Kota Semarang untuk meningkatkan keberlangsungan program penanggulangan kemiskinan dan memberikan informasi perihal hambatan-hambatan yang dialami masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan.

c. Bagi Warga Kelurahan Pakintelan

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada masyarakat Kelurahan Pakintelan untuk lebih berpartisipasi dalam

kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah kelurahan guna menciptakan daerah yang sejahtera dan mandiri, serta membantu masyarakat dalam mempublikasikan hasil karyanya.

3. Batasan Istilah

Batasan istilah dimaksud agar terdapat kesamaan dalam memahami penelitian yang berjudul “Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Kampung Kerajinan Bambu dan Rotan (KRABATAN) di Kelurahan Pakintelan Kota Semarang”. Selain itu juga untuk membatasi ruang lingkup objek penelitian ini.

a. Pemberdayaan masyarakat

Pemberdayaan masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah Kelurahan Pakintelan Kota Semarang dengan melibatkan masyarakat secara aktif untuk ikut serta dalam mengelola dan mengembangkan potensi yang dimiliki kelurahan sehingga dapat menjadikan Kelurahan Pakintelan menjadi daerah yang mandiri dan sejahtera.

b. Kampung Kerajinan Bambu dan Rotan (KRABATAN)

Kampung KRABATAN merupakan sebutan untuk kampung tematik dimana masyarakatnya memproduksi beraneka kerajinan bambu dan rotan. Kampung ini berada di Kelurahan Pakintelan Kota Semarang yang beralamat di Jalan Wonongsari, Pakintelan, Gunungpati, Kota Semarang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teoretis

1. Pemberdayaan Masyarakat

a. Definisi Pemberdayaan Masyarakat

Pengertian pemberdayaan masyarakat ada beberapa menurut para ahli. Parsons (dalam Sururi, 2015:5) menyatakan bahwa pemberdayaan merupakan sebuah proses agar setiap orang menjadi cukup kuat dalam berpartisipasi di berbagai pengontrolan dan mempengaruhi kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Dimana yang dimaksud dalam pernyataan tersebut, pemberdayaan masyarakat didefinisikan sebagai usaha suatu lembaga dalam mengembangkan potensi setiap individu. Hal ini juga diungkapkan oleh Suharto (dalam Harahap, 2017:182) dimana yang dimaksud dengan pemberdayaan merupakan suatu serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Kelompok lemah yang dimaksud yaitu orang-orang yang tidak berdaya baik secara ekonomi, pendidikan maupun sosial. Kemudian dijelaskan lebih lanjut bahwa pemberdayaan dilaksanakan guna memanfaatkan potensi-potensi yang ada di daerah tersebut menjadikan masyarakat yang mandiri (Suhastyo, 2017:64).

Berikut merupakan pergeseran paradigma dalam pembangunan masyarakat.

Paradigma Lama (pembangunan)	Paradigma Baru (Pemberdayaan)
Fokus pada pertumbuhan ekonomi	Fokus pada pertumbuhan yang berkualitas dan berkelanjutan
Otoritarisme ditolerir sebagai harga yang harus dibayar karena pertumbuhan	Menonjolkan nilai-nilai kebebasan, otonomi, harga diri, dll
Negara memberi subsidi pada pengusaha kecil	Negara membuat lingkungan yang memungkinkan
Negara menyediakan layanan ketahanan nasional	Pengembangan institusi lokal untuk ketahanan nasional
Transfer teknologi dari negara maju	Penghargaan terhadap kearifan dan teknologi lokal
Transfer aset-aset berharga pada negara maju	Penguatan institusi untuk melindungi aset komunitas miskin
Pembangunan nyata yang diukur dari nilai ekonomis oleh pemerintah	Pembangunan adalah proses multidimensi dan sering tidak nyata
Sektoral	Menyeluruh
Organisasi hirarkis untuk melaksanakan proyek	Organisasi belajar non hirarkis
Peran negara: prosedur, penyelenggara, pengatur, dan konsumen besar	Peran negara: menciptakan kerangka legal yang kondusif, membagi kekuasaan, mendorong tumbuhnya institusi masyarakat

Tabel 2.1. Pergeseran Paradigma Pembangunan Masyarakat

Sumber Utsman dan Mulyono (dalam Tim Jurusan Pendidikan Luar Sekolah, 2010:18)

Pemberdayaan masyarakat dengan pembangunan masyarakat sering mengalami tumpang tindih pemahaman. Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pada hakekatnya memiliki pemahaman yang sama yakni perubahan sosial yang dilakukan secara sengaja atau terencana. Namun sejatinya terdapat perbedaan antara pengertian pembangunan masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat. Dimana yang dimaksud dengan pembangunan masyarakat merupakan suatu program perubahan yang dilakukan oleh pemerintah namun bersifat jangka pendek, temporal dan parsial. Sedangkan yang dimaksud dengan pemberdayaan masyarakat yaitu suatu program yang sengaja dilakukan oleh pemerintah untuk memfasilitasi masyarakat dalam merencanakan, memutuskan dan mengelola sumberdaya yang dimiliki sehingga pemberdayaan ini bersifat jangka panjang dan berkesinambungan (Noor, 2011:88). Pada dasarnya, pemberdayaan meletakkan masyarakat sebagai pelaku aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan tahap evaluasi dan pemerintah hanya sebagai fasilitator. Mardikanto dan Soebianto (dalam Harahap, 2018:45) menyatakan hal yang sama dengan Noor bahwa konsep pemberdayaan sejatinya meletakkan masyarakat tidak sebagai objek dari berbagai kegiatan pembangunan, namun masyarakat merupakan subjek dari upaya pembangunan tersebut.

Pendapat yang berbeda dikemukakan oleh Kursrini, dkk (2017:144) yang menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat yaitu upaya untuk meningkatkan kualitas, kuantitas, serta nilai tambah barang, jasa, atau sumber daya desa. Hal tersebut guna memperbaiki arah kebijakan, tata kelola, eksploitasi dan konservasi sumber daya alam yang dimiliki daerah. Selain itu, pemberdayaan masyarakat juga untuk meningkatkan kondisi sosial ekonomi, perbaikan moral dan karakter, serta pendidikan masyarakat. Hal tersebut membuktikan bahwa pemberdayaan masyarakat dilaksanakan dengan harapan mampu meningkatkan kualitas baik pada sumber daya manusia maupun kualitas daerah tersebut. Sehingga dengan adanya perbaikan kualitas dan kuantitas tersebut mampu memberikan perubahan kondisi masyarakat dalam berbagai segi.

Pandangan lebih luas dikemukakan oleh Utsman dan Mulyono (dalam Tim Jurusan Pendidikan Luar Sekolah, 2010:17) bahwa pemberdayaan masyarakat terdapat beberapa sudut pandang. Pertama, pemberdayaan masyarakat dimaknai dalam konteks menempatkan kedudukan masyarakat. Dimana masyarakat bukanlah obyek penerima manfaat yang bergantung pada pemberian dari pihak luar namun kedudukan masyarakat sebagai subyek yang berbuat secara mandiri. Kedua, pemberdayaan masyarakat secara prinsipil berurusan dengan upaya memenuhi kebutuhan masyarakat. Ketiga, pemberdayaan masyarakat terbentang dari proses sampai visi ideal. Keempat, pemberdayaan masyarakat terbentang dari level psikologis-personal

(anggota masyarakat) sampai ke level struktural masyarakat secara kolektif.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut mengenai pengertian pemberdayaan masyarakat, dapat dipahami bahwa pemberdayaan masyarakat tidak memiliki makna tunggal. Pemberdayaan dapat dipahami secara bermacam-macam menurut sudut pandang seseorang maupun konteks pandangannya. Ada yang memandang pemberdayaan sebagai suatu proses pembangunan, pemandirian masyarakat, menswadayakan, maupun perbaikan perekonomian masyarakat dan adapula yang berpendapat bahwa pemberdayaan merupakan sebuah proses memfasilitasi masyarakat untuk mengelola sumberdaya dan potensi yang dimiliki.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan suatu usaha untuk memajukan masyarakat dalam mengelola potensi yang dimilikinya secara mandiri. Pemberdayaan masyarakat sangat memprioritaskan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan sekaligus sebagai kontrol publik dalam pengimplementasian kebijakan-kebijakan yang telah disepakati. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat ini merupakan transformasi politik kedalam tindakan nyata. Masyarakat memiliki peranan aktif didalamnya, sehingga masyarakat tidak hanya sebagai objek yang menerima kebijakan namun juga bertindak sebagai subyek yang berpartisipasi aktif didalamnya untuk kepentingan bersama.

Upaya meningkatkan kemampuan dan potensi masyarakat sangatlah penting. Adanya peningkatan kualitas kemampuan dan potensi yang dimiliki suatu daerah dapat menjadikan masyarakat pada daerah tersebut mampu bersaing dengan masyarakat lainnya. Selain itu, hal ini juga dapat meningkatkan taraf hidup serta mengembangkan kemampuan masyarakat secara baik dalam berbagai segi baik itu dalam bidang ekonomi, pendidikan, agama, sosial maupun budaya.

b. Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Pada konsep pemberdayaan, pemberdayaan menekankan pada proses memberikan kemampuan kepada masyarakat agar menjadi berdaya, mendorong atau memotivasi individu agar memiliki kemampuan (Hatu, 2010:243). Oleh sebab itu, guna melancarkan proses pemberdayaan dibutuhkan adanya pemilihan strategi yang tepat yang disesuaikan dengan kondisi pada lingkungan masyarakat tersebut. Mardikanto dan Soebianto (2018:167-168) secara konseptual memandang strategi dalam beragam pendekatan, seperti:

1) Strategi sebagai suatu rencana

Strategi merupakan acuan yang dijadikan landasan dalam merencanakan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu, dalam merumuskan strategi senantiasa memperhatikan kekuatan dan kelemahan, peluang dan ancaman baik dari segi internal maupun eksternal.

2) Strategi sebagai kegiatan

Strategi merupakan usaha yang dilakukan oleh setiap individu, organisasi maupun lembaga untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

3) Strategi sebagai suatu instrumen

Strategi merupakan alat yang digunakan oleh pemimpin organisasi/lembaga dalam pelaksanaan kegiatan yang dijadikan sebagai pedoman dan alat pengendalian.

4) Strategi sebagai suatu sistem

Strategi merupakan kesatuan rencana dan tindakan yang komprehensif dan terpadu yang diarahkan untuk menghadapi tantangan yang menghambat tercapainya tujuan tertentu.

5) Strategi sebagai pola pikir

Strategi merupakan suatu tindakan yang terstruktur dilandasi oleh wawasan yang luas mengenai kondisi internal dan eksternal dalam rentang waktu yang relatif panjang, serta kemampuan mengambil keputusan untuk menentukan alternatif-alternatif terbaik untuk memperoleh peluang dan keberhasilan.

Berdasarkan beragam pemahaman terkait definisi strategi pemberdayaan maka dapat dipahami bahwa strategi merupakan proses dan upaya yang penting berkaitan dengan pedoman, pengendalian dan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan tertentu. Perihal strategi

pemberdayaan, terdapat beberapa para ahli yang mengemukakan macam-macam strategi pemberdayaan.

Sumaryadi (dalam Mardikanto dan Soebianto, 2018:169) mengemukakan adanya lima generasi strategi pemberdayaan. Pertama, generasi yang mengutamakan *relief and welfare*, yaitu strategi yang lebih mengutamakan pada kekurangan dan kebutuhan individu dan masyarakat, seperti: sadang, pangan, kesehatan, pendidikan, dsb. Kedua, *strategy community development* atau *small scale reliant local development*, yaitu strategi yang lebih mengutamakan pada kesehatan, penerapan teknologi tepat guna, dan pembangunan infrastruktur. Ketiga, generasi *sustainable system development*, yaitu strategi yang mengharapkan terjadinya perubahan pada tingkat regional dan nasional. Keempat, *people movement*, yaitu strategi yang mengembangkan gerakan masyarakat melalui pengorganisasian masyarakat, identifikasi masalah dan kebutuhan lokal, serta mobilisasi sumberdaya lokal yang ada. Strategi ini diharapkan akan terjadinya perubahan di dalam pelaksanaannya. Kelima, generasi pemberdayaan masyarakat (*empowering people*), yaitu strategi yang mengutamakan arti penting perkembangan, teknologi, persaingan, dan kerjasama.

Berkaitan dengan pendapat sebelumnya, Ismawan (dalam Mardikanto dan Soebianto, 2018:170) menetapkan ada 5 program strategi pemberdayaan yang terdiri dari: a) pengembangan sumberdaya manusia; b) pengembangan lembaga kelompok, c) pemupukan modal masyarakat, d) pengembangan usaha produktif; e) penyediaan informasi tepat-guna.

Pendapat lain dikemukakan oleh Soetomo (2008:10) yang berpendapat bahwa dalam melakukan pemberdayaan dapat dilakukan melalui strategi pemberdayaan yaitu pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan, dan pemeliharaan, dengan penjelasan sebagai berikut.

- 1) Pemungkinan yaitu menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat miskin berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu berinovasi menciptakan kondisi masyarakat yang lebih baik dengan mencoba mengembangkan potensi yang dimiliki masyarakat.
- 2) Penguatan yaitu memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat miskin dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Artinya, bahwa dalam pemberdayaan dapat dilakukan dengan memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan kepada masyarakat. Masyarakat yang memiliki pengetahuan dan kemampuan yang cukup akan membentuk individu-individu yang mandiri.

- 3) Perlindungan yaitu melindungi masyarakat terutama kelompok kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dan lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.
- 4) Penyokongan yaitu memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat miskin mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu memberikan dukungan serta dorongan kepada masyarakat kecil agar mereka tidak semakin tersisihkan dan mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- 5) Pemeliharaan yaitu dalam arti memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

Berbeda dengan pendapat Usman, Sunyoto (2015:56) berpendapat bahwa ada beberapa strategi yang dapat menjadi pertimbangan untuk dipilih dan kemudian diterapkan dalam pemberdayaan masyarakat.

- 1) *Enabling*, menciptakan keadaan yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Timbal baliknya adalah pengenalan bahwa setiap individu, manusia maupun masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun

- daya itu dengan cara mendorong (*encourage*), memotivasi dan membangkitkan kesadaran (*awareness*) akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkan potensi tersebut.
- 2) *Empowering*, yaitu meningkatkan kapasitas dengan memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat. Hal ini meliputi langkah-langkah nyata seperti penyediaan berbagai masukan (input) serta pembukaan akses kepada berbagai peluang yang dapat membuat masyarakat menjadi makin berdaya.
 - 3) *Protecting*, yaitu melindungi kepentingan dengan mengembangkan sistem perlindungan bagi masyarakat yang menjadi subjek pengembangan. Dalam proses pemberdayaan harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena ketidakberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Melindungi dalam hal ini dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut mengenai strategi pemberdayaan masyarakat, dapat dipahami bahwa dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat membutuhkan adanya strategi yang tepat. Dimana dalam menentukan strategi yang dipilih perlu melihat kondisi lingkungan dan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Pada dasarnya strategi pemberdayaan merupakan upaya yang diarahkan untuk mengembangkan kemampuan dan kesadaran masyarakat untuk bangkit dari kondisi yang terpuruk. Masyarakat diberikan bekal pengetahuan dan kemampuan agar

menjadi masyarakat yang berdaya sehingga mampu menyelesaikan masalah-masalah sosial terutama dalam lingkup terkecil yaitu keluarga.

c. Tahap-tahap Pemberdayaan

Purbantara (2015:6) berpendapat bahwa pemberdayaan tidak bersifat selamanya, melainkan hanya sampai tujuan dimana masyarakat mampu untuk mandiri. Artinya bahwa pemberdayaan merupakan suatu proses belajar masyarakat hingga mencapai target yaitu masyarakat yang mandiri. Meskipun demikian, dalam mencapai kemandirian masyarakat tersebut tetap diperlukan adanya pemeliharaan semangat, kondisi dan kemampuan secara terus menerus agar tidak mengalami kemerosotan. Proses belajar dalam pemberdayaan membutuhkan adanya tahap-tahapan. Tahap-tahap pemberdayaan menurut Purbantara (2015:6) sebagai berikut.

- 1) Tahap penyadaran dan tahap pembentukan perilaku menuju perilaku yang sadar dan peduli akan pentingnya mengembangkan kapasitas diri.
- 2) Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, keterampilan agar terbukanya wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan.
- 3) Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian.

Pendapat lain dari Mardikanto (2018:125) mengemukakan bahwa tahapan dalam pemberdayaan masyarakat memiliki 4 tahapan.

- 1) Tahapan pertama seleksi lokasi. Seleksi wilayah sesuai dengan kriteria yang telah disepakati oleh lembaga pihak-pihak terkait dan masyarakat. Penetapan lokasi sangat penting agar pemberdayaan masyarakat akan tercapai seperti yang diharapkan. Seleksi lokasi untuk menentukan lokasi masyarakat miskin yang benar-benar harus diberdayakan.
- 2) Sosialisasi pemberdayaan masyarakat. Sosialisasi merupakan upaya untuk mengkomunikasikan kegiatan untuk menciptakan dialog dengan masyarakat. Melalui proses sosialisasi akan membantu menciptakan pemahaman masyarakat dan pihak terkait tentang program dan atau kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah direncanakan. Proses sosialisasi menjadi penting karena akan menentukan minat atau ketertarikan masyarakat untuk berpartisipasi dalam program pemberdayaan masyarakat yang dikomunikasikan.
- 3) Proses pemberdayaan masyarakat. Hakekat pemberdayaan masyarakat adalah untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya. Dalam proses tersebut masyarakat bersama-sama melakukan hal-hal berikut ini: (a) kajian keadaan pedesaan partisipatif, (b) pengembangan kelompok, (c) penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan, dan (d) monitoring dan evaluasi partisipatif.

- 4) Pemandirian masyarakat arah kemandirian masyarakat adalah berupa pendampingan untuk menyiapkan masyarakat agar benar benar mampu mengelola sendiri kegiatannya kerana prinsip pemberdayaan masyarakat adalah untuk memandirikan masyarakat dan meningkatkan taraf hidupnya. Proses pemberdayaan masyarakat terkait erat dengan faktor internal dan eksternal. Dalam hubungan ini meskipun faktor internal sangat penting sebagai salah satu wujud *selforganizing* dari masyarakat, namun kita juga perlu memberikan perhatian terhadap faktor eksternalnya. Proses pemberdayaan masyarakat mestinya juga didampingi oleh satu tim fasilitator yang bersifat multidisiplin. Tim pendamping ini merupakan salah satu faktor eksternal dalam pemberdayaan masyarakat. Peran tim pada awal proses sangat aktif tetapi akan berkurang secara bertahap selama proses berjalan sampai masyarakat sudah mampu melanjutkan kegiatannya secara mandiri.

Adapula pendapat dari Wilson (dalam Dwiyanto dan Jemadi, 2013:40) bahwa terdapat 7 tahapan dalam siklus pemberdayaan masyarakat, seperti tabel 2.2. berikut.

Tabel 2.2. Tahapan dalam Siklus Pemberdayaan Masyarakat

Tahap	Deskripsi
Tahap pertama	Keinginan dari masyarakat sendiri untuk berubah menjadi lebih baik.
Tahap kedua	Mampu melepaskan halangan-halangan atau faktor-faktor yang bersifat resistensi terhadap kemajuan dalam dirinya dan komunitasnya.
Tahap ketiga	Sudah menerima kebebasan tambahan dan merasa memiliki tanggungjawab dalam mengembangkan dirinya dan komunitasnya
Tahap keempat	Upaya untuk mengembangkan peran dan batas tanggungjawab yang lebih luas, juga terkait dengan minat dan motivasi untuk melakukan pekerjaan dengan baik
Tahap kelima	Mulai adanya hasil-hasil nyata peningkatan rasa memiliki yang lebih besar dan menghasilkan keluaran kinerja dengan lebih baik
Tahap keenam	Telah terjadi perubahan perilaku dan kesan terhadap dirinya, dimana meningkatkan perasaan psikologis di atas posisi sebelumnya.
Tahap ketujuh	Telah berhasil dalam memperdayakan dirinya, merasa tertantang untuk mendapatkan hasil yang lebih baik

Berdasarkan tabel diatas dapat dipahami bahwa dalam pemberdayaan terdapat siklus proses mengenai upaya individu maupun masyarakat dalam melakukan perubahan menjadi lebih baik. Serangkaian perubahan dalam mengembangkan potensi dan keterampilan masyarakat menjadikan masyarakat lebih berdaya.

Selain memahami tahap-tahapan pemberdayaan masyarakat, perlu pula dipahami bahwa pemberdayaan masyarakat juga harus melibatkan

beberapa elemen yang ada di dalam masyarakat. Elemen-elemen tersebut meliputi.

- 1) Peranan pemerintah dalam membangun partisipasi, menciptakan peraturan, dan kebijakan dilingkungan masyarakat.
- 2) Organisasi-organisasi kemasyarakatan diluar lingkungan masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan organisasi nasional maupun lokal yang ikut mendukung program pemberdayaan tersebut.
- 3) Lembaga masyarakat yang tumbuh dari dan didalam masyarakat itu sendiri (*local community organizatiol*) seperti BPD, PKK, Karang Taruna dan sebagainya.
- 4) Keterlibatan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan masyarakat.

Elemen-elemen tersebut yang memiliki peranan penting dalam pemberdayaan masyarakat. Dimana elemen satu sama lain saling bersinergi, apabila ada satu elemen yang tidak terpenuhi maka pemberdayaan tidak dapat berjalan dengan baik.

d. Metode Pemberdayaan Masyarakat

Pemerintah memiliki peran sebagai fasilitator, artinya bahwa pemerintah bertanggungjawab untuk mengkomunikasikan inovasi dalam rangka mengubah dan mengembangkan potensi masyarakatnya. Kondisi masyarakat sangatlah beragam maka dalam pelaksanaan pemberdayaan memunculkan manfaat yang beragam pula baik itu mengenai karakteristik

individunya, beragam lingkungan sosial dan fisik, beragam kebutuhan-kebutuhan individu, motivasi, maupun tujuan yang diinginkannya. Selaras dengan pendapat Kang dan Song (dalam Mardikanto dan Soebianto, 2018:197) yang menyimpulkan bahwa tidak adanya satupun metode yang selalu efektif untuk diterapkan dalam setiap kegiatan pemberdayaan masyarakat. Dalam realitanya, kegiatan pemberdayaan bahkan dapat menggunakan lebih dari satu metode guna menunjang terlaksananya pemberdayaan.

Metode merupakan suatu kerangka kerja untuk menyusun suatu tindakan, menyusun gagasan yang beraturan, terarah, dan berkonteks relevan dengan maksud dan tujuan (Mardikanto dan Soebianto, 2018:197). Dalam praktik pemberdayaan masyarakat terdapat macam-macam metode pemberdayaan masyarakat, yaitu sebagai berikut.

No	Kelompok Metode	Ragam Metode	Ket.
1.	Tatap-muka	Percakapan, anjang-karya, diskusi, FGD, pelatihan, RRA, PRA, PLA, ceramah, pertemuan	Individu Kelompok Masal
2.	Percakapan tak langsung	Telepon, TV, radio	Individu Kelompok
3.	Demonstrasi	Demonstrasi cara, demonstrasi hasil, demonstrasi cara dan hasil	Kelompok
4.	Barang cetakan	Foto, pamflet, leaflet, folder, dll	
5.	Media massa	Surat kabar, majalah, TV, Radio	Media cetak Media lisan
6.	Kampanye	Gabungan dari semua metode diatas	

Tabel 2.3. Metode Pemberdayaan Masyarakat
Sumber Mardikanto dan Soebianto (2018:198)

Berkaitan dengan beragam metode pemberdayaan masyarakat diatas, Van den Hawkins (dalam Mardikanto dan Soebianto, 2018:213) membuat sebuah rangkuman tentang karakteristik beragam metode. Berdasarkan hasil rangkumannya, metode pemberdayaan masyarakat yang dipandang sebagai metode yang paling efektif yaitu demonstrasi (cara dan atau hasil).

e. Materi Pemberdayaan Masyarakat

Materi pemberdayaan masyarakat merupakan segala pesan yang ingin disampaikan oleh fasilitator kepada masyarakat penerima manfaat atau yang sering disebut sebagai inovasi (Mardikanto dan Soebianto, 2018:217). Pemberdayaan masyarakat merupakan proses pendidikan, memberikan pesan atau pembaharuan yang bertujuan untuk melakukan pembangunan dan perubahan. Oleh sebab itu, sebagai proses pendidikan maka kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat membutuhkan rincian beragam materi yang akan disampaikan oleh fasilitator. Sasaran pemberdayaan masyarakat adalah “manusia” yang mana harus memperbaiki kualitas kehidupannya. Oleh sebab itu, materi-materi yang disampaikan tidak cukup hanya sekedar hal-hal yang berkaitan langsung dengan kegiatan yang dapat dikerjakan, namun juga perihal upaya perbaikan kesejahteraan keluarga, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kehidupan ditengah-tengah masyarakat.

Materi pemberdayaan masyarakat berhubungan erat dengan ruang lingkup pemberdayaan masyarakat. Mardikanto dan Soebianto (2018:223)

menjelaskan bahwa ruang lingkup pemberdayaan masyarakat meliputi: bina manusia, bina usaha, bina lingkungan, dan bina kelembagaan, dengan penjelasan sebagai berikut.

1) Bina Manusia

Pemberdayaan masyarakat memiliki tujuan utama yaitu memberdayakan masyarakat. Maka dalam hal ini materi pemberdayaan masyarakat difokuskan menjadi dua hal yaitu peningkatan kemampuan masyarakat dan peningkatan posisi-tawar masyarakat.

2) Bina Usaha

Bina usaha yang diupayakan melalui pemberdayaan masyarakat mencakup hal-hal yang meliputi: (1) peningkatan pengetahuan teknis, terutama untuk meningkatkan kualitas produktivitas, perbaikan kualitas dan nilai tambah produk; (2) perbaikan manajemen untuk meningkatkan efektifitas usaha dan pengembangan jejaring kemitraan; (3) pengembangan jiwa kewirausahaan terkait dengan peluang dan dukungan potensi lokal; (4) peningkatan aksesibilitas terhadap modal, pasar, dan informasi; (5) advokasi kebijakan yang berpihak kepada pengembangan ekonomi rakyat.

3) Bina Lingkungan

Fenomena yang terjadi pada zaman dahulu, pembangunan yang dilakukan berakibat negatif terhadap lingkungan, seperti merusak hutan, pencemaran lingkungan dari limbah industri/pertanian/rumah

tangga, serta perusakan lahan pertambangan. Oleh sebab itu, materi yang diberikan untuk bina lingkungan dalam pemberdayaan masyarakat yaitu upaya menumbuhkan kesadaran lingkungan baik sumber daya alam maupun lingkungan hidup lainnya.

4) Bina Kelembagaan

Bina kelembagaan tidak hanya berupa pembentukan lembaga-lembaga yang diperlukan, namun juga menentukan efektifitas fungsi lembaga tersebut dalam masyarakat. Hal tersebut menjadi penting karena dalam pemberdayaan masyarakat tidak hanya masyarakat saja yang perlu mendapatkan pesan/pendidikan namun juga kelembagaan yang bergerak sebagai fasilitator dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat.

f. Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat

Evaluasi sering juga disebut sebagai penilaian. Frutchey (dalam Mardikanto dan Soebiato, 2018:265) berpendapat bahwa evaluasi merupakan kegiatan pengamatan dengan membanding-bandingkan antara hasil pengamatan dengan pedoman yang ada serta penilaian atas obyek yang diteliti. Pendapat yang sama dikemukakan oleh Soumelis (dalam Mardikanto dan Soebiato, 2018:265) evaluasi merupakan proses pengambilan keputusan melalui kegiatan membandingkan hasil pengamatan terhadap suatu obyek. Jadi dapat disimpulkan bahwa evaluasi merupakan kegiatan menilai atau mengukur suatu obyek berdasarkan pada fakta atau data dengan menggunakan pedoman tertentu.

Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat tentu saja membutuhkan adanya evaluasi dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Hal ini bertujuan agar mengetahui keefektivitas dan efisiensi kegiatan pemberdayaan berlangsung. Kemudian, evaluasi dibutuhkan guna mengetahui seberapa jauh kegiatan-kegiatan pemberdayaan berlangsung sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan dan tingkat keberhasilan dalam kegiatan tersebut.

Dalam melaksanakan evaluasi pemberdayaan perlu memperhatikan indikator-indikator pemberdayaan. Indikator berfungsi agar fasilitator dapat mengetahui fokus dan tujuan pemberdayaan yang menunjukkan masyarakat tersebut berdaya atau tidak. Pemberdayaan dapat dikatakan berhasil dapat dilihat dari keberdayaan masyarakat yang menyangkut berbagi segi kehidupan, baik yang menyangkut perihal ekonomi, kesejahteraan, maupun kemampuan kultural dan politis jenis.

g. Indikator Keberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan memerlukan adanya indikator yang berfungsi sebagai tolak ukur tujuan pemberdayaan. Adanya indikator dapat menunjukkan seseorang tersebut berdaya atau tidak berdaya. Jadi, dalam memberikan pendampingan sosial dapat dioptimalkan pada aspek-aspek kebutuhan masyarakat yang menjadi sasaran. Adapun beberapa pendapat dari para ahli mengenai macam-macam indikator pemberdayaan.

Schuler, Hashemi, dan Rilley dalam (Mardikanto dan Soebianto, 2018:289) mengembangkan beberapa indikator pemberdayaan yang

disebut dengan istilah *empowerment index* atau indeks pemberdayaan, sebagai berikut.

- 1) Kebebasan mobilitas yaitu kemampuan individu untuk pergi ke luar rumah atau wilayah tempat tinggalnya, seperti tempat ibadah, rumah tetangga, fasilitas medis, dan pasar.
- 2) Kemampuan membeli komoditas “kecil”. Kemampuan individu untuk membeli barang-barang kebutuhan keluarga sehari-hari, dan kebutuhan dirinya.
- 3) Kemampuan membeli komoditas “besar”. Kemampuan individu untuk membeli barang-barang sekunder atau tersier, seperti: almari, televisi, handphone, dan sebagainya.
- 4) Terlibat dalam pembuatan keputusan-keputusan rumah tangga.
- 5) Kebebasan relatif dari dominasi keluarga.
- 6) Memiliki kesadaran hukum dan politik.
- 7) Keterlibatan dalam kampanye dan protes-protes.
- 8) Jaminan ekonomi dan distribusi terhadap keluarga, seperti memiliki rumah, tanah, tabungan, dan sebagainya.

Lebih lanjut dijelaskan oleh Mardikanto (dalam Mardikanto dan Soebianto, 2018:291) mengemukakan beberapa indikator keberhasilan yang digunakan untuk mengukur pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat, sebagai berikut.

- 1) Jumlah warga yang secara nyata tertarik untuk hadir dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan.

- 2) Frekuensi kehadiran tiap warga pada pelaksanaan tiap jenis kegiatan.
- 3) Tingkat kemudahan penyelenggaraan program untuk memperoleh pertimbangan atau persetujuan warga atas ide baru yang dikemukakan.
- 4) Jumlah dan jenis ide yang dikemukakan oleh masyarakat yang ditujukan untuk kelancaran pelaksanaan program pengendalian.
- 5) Jumlah dana yang dapat digali dari masyarakat untuk menunjang pelaksanaan program kegiatan.
- 6) Intensitas kegiatan petugas dalam pengendalian masalah.
- 7) Meningkatnya kemandirian masyarakat.

Dapat disimpulkan bahwa indikator keberhasilan pemberdayaan dapat dilihat dari keberdayaan masyarakat menyangkut kemampuan ekonomi, kemampuan mengakses manfaat kesejahteraan, partisipasi masyarakat, dan kemampuan kultural dan politis.

2. Kesejahteraan Masyarakat

a. Definisi Kesejahteraan Sosial

Pada hakekatnya, pemberdayaan membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan masyarakat secara umum meliputi kebutuhan dasar, psikis, spiritual dan sosial. Kesejahteraan dasar manusia meliputi pangan, tempat tinggal, sandang, kesehatan dan pendidikan. Kebutuhan psikis meliputi kebutuhan keberfungsian mental seperti memori, pembelajaran, integensi, dan kepribadian. Kesejahteraan spiritual dapat meliputi seperti kedamaian hidup, makna hidup, tujuan

hidup dan semangat hidup. dan kesejahteraan sosial meliputi kebutuhan pengakuan keberadaan individu dalam keberadaan dengan sesama.

Husna (2014:46) menjelaskan bahwa kesejahteraan sosial merupakan suatu keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan, ketentraman, kemakmuran dan sebagainya. Suatu keadaan dapat dikatakan sejahtera apabila terpenuhinya kebutuhan masyarakat baik secara jasmani, rohani dan sosial. Pendapat lain dari Suharto (dalam Suradi, 2007:4) menyatakan bahwa kesejahteraan sosial didefinisikan sebagai kondisi sejahtera, yang dimaksud yaitu suatu keadaan dimana terpenuhinya segala bentuk kebutuhan hidup, khususnya yang bersifat mendasar seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan dan perawatan kesehatan. Hal ini menempatkan kesejahteraan sebagai tujuan dari sebuah pemberdayaan dan pembangunan masyarakat. Kesejahteraan sosial artinya terciptanya kondisi dimana berbagai permasalahan sosial dapat dikelola dengan baik dan segala kebutuhan hidup masyarakat dapat dipenuhi.

Suharto (2014:2) berpendapat bahwa kesejahteraan sosial memiliki beberapa makna yang relatif berbeda, walaupun substansinya tetap sama. Kesejahteraan sosial memiliki tiga konsepsi, yaitu : a) kondisi kehidupan atau keadaan sejahtera. Maksud hal tersebut suatu kondisi dikatakan sejahtera apabila terpenuhinya kebutuhan hidup masyarakat khususnya yang bersifat mendasar seperti makanan, tempat tinggal pendidikan dan kesehatan; b) institusi, arena atau bidang kegiatan yang melibatkan lembaga kesejahteraan sosial dan berbagai profesi kemanusiaan yang

menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial dan pelayanan sosial; d) aktivitas, yaitu suatu kegiatan-kegiatan atau usaha yang terorganisasi untuk mencapai kondisi sejahtera.

b. Tahapan Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan bukanlah hanya semata fenomena ekonomi saja, namun juga pada fenomena sosial-budaya yang melibatkan nilai-nilai interaksi sosial sebagai upaya mencapai kesejahteraan hidup. Tiga kebutuhan yang harus dipenuhi dalam kehidupan masyarakat yaitu kebutuhan dasar, kebutuhan sosial dan kebutuhan pengembangan. Sehingga kesejahteraan memiliki beberapa tahapan yaitu sebagai berikut (Nasdian, 2014:139).

- 1) Keluarga Pra sejahtera, yaitu keluarga-keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, seperti kebutuhan pangan, sandang, pendidikan dan tempat tinggal.
- 2) Keluarga sejahtera tahap I, yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, tetapi belum dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan sosial psikologisnya, seperti kebutuhan ibadah, ruang interaksi keluarga, mempunyai penghasilan, dan lain-lain.
- 3) Keluarga sejahtera tahap II, yaitu keluarga-keluarga yang disamping telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, juga telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan sosial psikologisnya, akan tetapi belum dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan pengembangannya, seperti

ikut melaksanakan kegiatan dalam masyarakat, mampu memperoleh informasi dari media, menabung, dan sebagainya.

- 4) Keluarga sejahtera tahap III, yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasar, kebutuhan sosial psikologis dan kebutuhan pengembangannya, namun belum dapat memberikan sumbangan yang maksimal terhadap masyarakat, seperti aktif dalam kegiatan lembaga kemasyarakatan, pendidikan, dan sebagainya.
- 5) Keluarga sejahtera tahap III plus, yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhannya, baik yang bersifat dasar, sosial psikologis maupun yang bersifat pengembangan serta telah dapat memberikan sumbangan yang nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Berdasarkan pada hal diatas, kesejahteraan sosial memiliki tujuan sebagai berikut (Nurfitriyana, dkk, 2012: 565).

- 1) Mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standart kehidupan pokok seperti sandang, perumahan, pangan, kesehatan dan relasi-relasi sosial yang harmonis dengan lingkungannya.
- 2) Mencapai penyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat di lingkungannya, misalnya dengan menggali sumber-sumber, meningkatkan, dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan.

B. Penelitian yang Relevan

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah, dugaan atau jawaban sementara terhadap suatu masalah haruslah menggunakan pengetahuan sebagai dasar argumen dalam mengkaji persoalan. Hal ini dapat dimaksukan agar diperoleh jawaban yang dapat diandalkan. Peneliti mengkaji teori-teori dan hasil penelitian yang relevan dengan masalah yang diteliti. Langkah-langkah untuk mendukung penelitian yang akan dilakukan, peneliti mengkaji hasil penelitian terdahulu sebagai berikut.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Hesti Pratiwi dengan judul *Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Desa Wisata Mandiri di Desa Wanureja Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang*. Hasilnya bahwa strategi pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan menggunakan tiga tahap yaitu pelatihan, promosi dan kerjasama yang kemudian menciptakan Desa Wanureja menjadi desa wisata yang mandiri dan sejahtera. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian terdahulu memiliki fokus penelitian yaitu mengenai strategi yang dipilih dalam pemberdayaan masyarakat guna mewujudkan desa wisata. Sedangkan dalam penelitian ini fokus penelitiannya adalah keseluruhan dari pelaksanaan pemberdayaan baik itu tahapan, strategi, dampak, sasaran dan kegiatan-kegiatan pemberdayaan. Adapula persamaan antara kedua penelitian ini yaitu baik penelitian terdahulu maupun yang akan dilaksanakan pemberdayaan masyarakat dilaksanakan dengan melihat

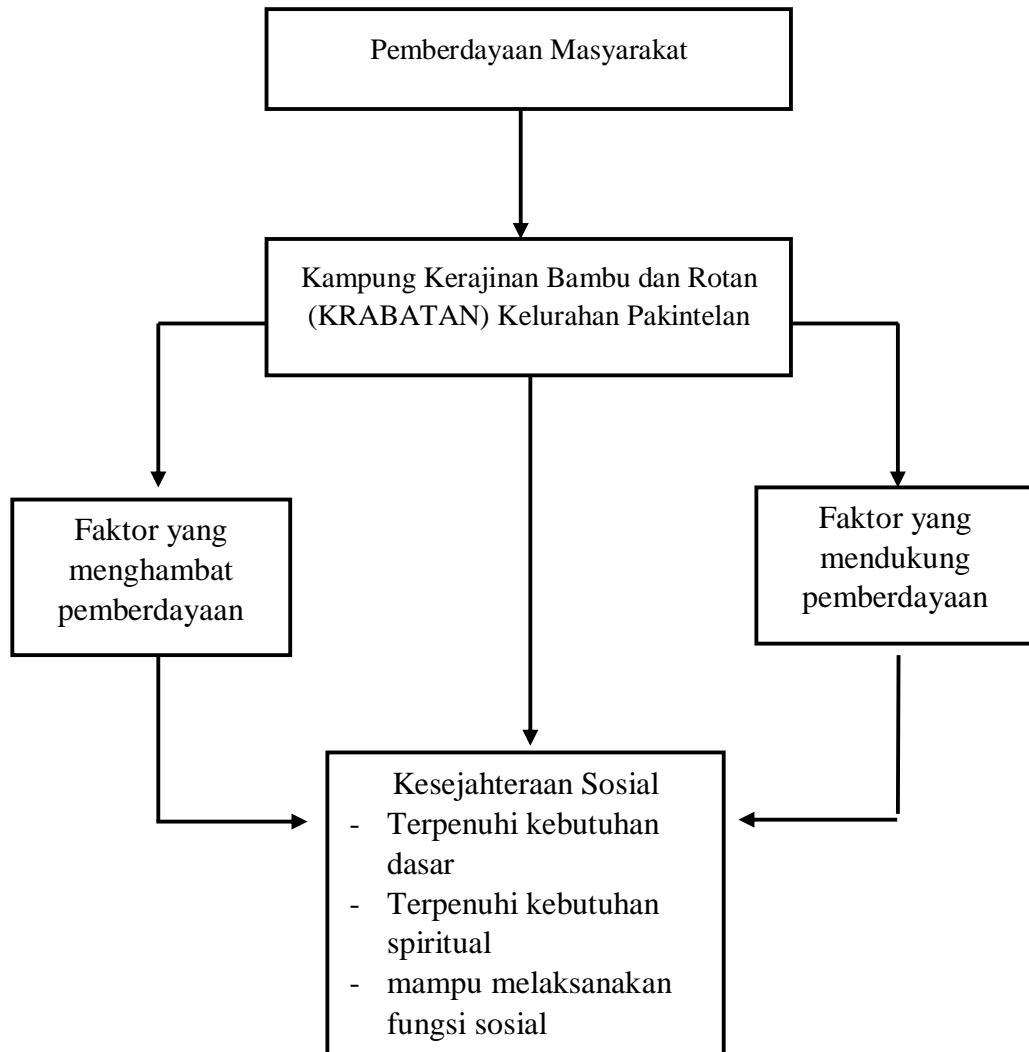
potensi desa yaitu sumber daya alam dan sumber daya masyarakat itu sendiri.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ibrahim Imron, Mochammad Saleh Soeidy dan Heru Ribawanto dengan judul *Pemberdayaan Masyarakat Miskin melalui Kelompok Usaha Bersama*. Hasil dari penelitian ini adalah pemberdayaan masyarakat melalui kelompok usaha bersama berhasil mengatasi masalah kemiskinan di Desa Dawuhan. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilaksanakan yaitu dalam penelitian ini yang menjadi sasaran dalam pemberdayaan masyarakat adalah masyarakat miskin saja dan pemberdayaan yang dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan dalam segi ekonomi sedangkan dalam penelitian yang akan dilaksanakan pemberdayaan masyarakat diberikan kepada seluruh masyarakat serta pemberdayaan dilaksanakan guna meningkatkan kesejahteraan sosial tidak hanya dalam bidang perekonomian masyarakat setempat. Adapula persamaan dari kedua penelitian ini, dimana kedua penelitian ini peneliti mengamati proses pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan faktor-faktor yang mendukung dan penghambat pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Sofiandi S.Sos.I dengan judul *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Lingkungan Di Desa Gilangharjo Pandak Kabupaten Bantul*. Hasil dari penelitian tersebut yaitu Pemberdayaan masyarakat yang ada di dusun Nogosari Desa Pandak Bantul berfokus pada pemberdayaan masyarakat berbasis lingkungan

dengan konsep dan sistem *Inegrated Farming System*, melalui pemberdayaan ini mampu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang limbah yang dapat dimanfaatkan menjadi pupuk sehingga dapat mengurangi tingkat pencemaran lingkungan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu pada penelitian ini yang diteliti merupakan program-program pemberdayaan yang dibuat oleh *Community Development* khususnya dalam bidang lingkungan yang mengatasi masalah pencemaran lingkungan akibat limbah yang tidak dimanfaatkan. Sedangkan pada penelitian yang akan dilaksanakan yang melaksanakan pemberdayaan Pemerintah Kelurahan yang bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat dan menjadikan daerah yang mandiri guna mengatasi masalah-masalah sosial yang ada di Kelurahan Pakintelan. Adapula persamaan dari kedua penelitian ini yaitu peneliti mengamati kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh suatu lembaga/organisasi melalui pemberdayaan masyarakat untuk mengatasi masalah yang ada di daerah tersebut.

C. Kerangka Berpikir

Berdasarkan kajian pustaka yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan bahwa pokok-pokok pikiran dari pemberdayaan masyarakat dalam program Kampung Kerajinan Bambu dan Rotan (KRABATAN) di Kelurahan Pakintelan Kota Semarang ada beberapa hal yang harus diamati yaitu dengan adanya otonomi daerah dimana setiap daerah memiliki hak untuk mengelola dan mengembangkan potensi yang dimilikinya maka Kelurahan Pakintelan memiliki inisiatif membuat program Kampung Kerajinan Bambu dan Rotan atau yang akrab disebut dengan Kampung KRABATAN. Program ini merupakan cara pemerintah kelurahan mengembangkan potensi yang dimiliki Kelurahan Pakintelan melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat. Sehingga masyarakat setempat mampu berperan aktif dalam mengembangkan dan mengelola Kampung KRABATAN untuk menjadikan Kelurahan Pakintelan menjadi daerah yang mandiri. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat juga tidak terlepas dengan adanya faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor yang mendukung dan menghambat menjadi sebab akibat keberhasilan dari pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dapat dikatakan berhasil apabila telah mencapai tujuan yang diinginkan. Dimana tujuan dilaksanakannya pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Pakintelan yaitu mewujudkan kesejahteraan sosial.



Bagan 2.1. Kerangka Berpikir Penelitian

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti utarakan pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat menyimpulkan dalam hal di bawah ini.

1. Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan oleh Kelurahan Pakintelan melalui program Kampung Kerajinan Bambu dan Rotan (KRABATAN). Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dimaksud yaitu pelatihan pengelolaan bambu dan rotan serta monitoring kelurahan. Tujuan pemberdayaan yaitu untuk mengembangkan kemampuan dan mengangkat perekonomian masyarakat. Tahapan dalam proses pemberdayaan masyarakat yaitu seleksi lokasi/wilayah; menyelenggaraan sosialisasi; pembentukan pengurus program yaitu paguyuban KRABATAN dan pelatihan membuat kerajinan bambu dan rotan; dan pengadaan evaluasi untuk mengukur keberhasilan proses pemberdayaan tersebut. Strategi yang digunakan dalam pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Pakintelan yaitu aras mezzo, yaitu dengan memberikan pelatihan, pendidikan, dan pembinaan kepada masyarakat dengan membentuk suatu kelompok yang disebut dengan Paguyuban KRABATAN, melalui paguyuban tersebut masyarakat belajar bersama untuk meningkatkan kualitas pada dirinya. Kemudian dampak yang ditimbulkan dengan adanya pemberdayaan masyarakat yaitu meningkatkan potensi (SDM) kelurahan, meningkat

solidaritas masyarakat, dan meningkat nilai jual hasil kerajinan bambu dan rotan di Kelurahan Pakintelan.

2. Faktor yang mendukung pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Pakintelan yaitu adanya sumber daya manusia yang unggul, adanya sumber daya alam yang memadai, respon positif masyarakat, dukungan dari Walikota Semarang, dan terjalinnya kerjasama antar mitra. Sedangkan, faktor yang menghambat pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yaitu keterbatasan modal masyarakat untuk memproduksi kerajinan bambu dan rotan, kurangnya partisipasi generasi muda, intensitas pelatihan yang masih kurang, serta belum optimalnya pemasaran hasil kerajinan masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, ada beberapa saran yang diajukan sebagai berikut.

1. Kepada pemerintah kelurahan, pelaksanaan program Kampung KRABATAN perlu adanya peningkatan dalam pelaksanaan pelatihan. Peningkatan yang dimaksud adalah memperkaya materi pelatihan, seperti *tips and tricks* marketing, menambah tenaga pelatih, serta pemanfaatan teknologi untuk memperluas publikasi dan pemasaran.
2. Kepada pemerintah daerah, program kredit wibawa saat ini belum dapat mencukupi kebutuhan modal masyarakat dalam membuat kerajinan. Hendaknya pemerintah daerah dapat memberikan plafon kredit wibawa

yang lebih tinggi agar dapat mencukupi kebutuhan modal pengrajin dalam jumlah produksi yang besar.

3. Kepada masyarakat di Kelurahan Pakintelan, partisipasi masyarakat sangat penting dalam upaya perubahan. Oleh sebab itu, perlu adanya peningkatan peran serta masyarakat khususnya generasi muda di Kelurahan Pakintelan dalam mengembangkan Kampung KRABATAN, seperti berpartisipasi aktif dalam kegiatan pemberdayaan, pengembangan teknologi, moderisasi pemasaran, dan sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Referensi Buku

- Adisasmita, Raharjo. 2006. *Pembangunan Perdesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Arikunto, S. 2006. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Arikunto, S. 2013. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Bagong, Suyanto. 2010. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Prenada Media Group
- Mardikanto, Totok dan Soebianto, Poerwoko. 2018. *Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Alfabeta
- Miles, B. Matthew dan Huberman A. Michael. *Analisis Data Kualitatif*. Diterjemahkan oleh Rohidi, Tjetjep Rohendi. 2007. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia
- Moleong, J. Lexy. 2010. *Metologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakakarya Offset
- Moleong, J. Lexy. 2016. *Metologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakakarya Offset
- Narbuko, Cholid dan Achmadi, Abu. 2007. *Metologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara
- Nasdian, Fredian Tonny. 2014. *Pembangunan Masyarakat*. Jakarta: Yayasan Pustala Obor Indonesia
- Purbantara, Arif dan Mujiyanto. 2015. *Modul KKN Tematik Desa Membangun Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia
- Sa'adah, Nurus. 2015. *Pemberdayaan Masyarakat Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sarwono, Jonathan. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Soetomo. 2008. *Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Suharto, Edi. 2014. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT Refika Aditama
- Tim Jurusan Pendidikan Luar Sekolah. 2010. *Model-Model Pemberdayaan Masyarakat Desa di Provinsi Jawa Tengah*. Semarang: Universitas Negeri Semarang

Usman, Sunyoto. 2015. *Esai-Esai Sosiologi Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Victorino, D. 2004. *Global Responsibility And Local Knowledge Systems*. Conference Held in Egypt

B. Referensi Jurnal

Aditiawatu, Pingkan, dkk. 2016' Pengembangan Potensi Lokal Di Desa Panawangan Sebagai Model Desa Vokasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat Dan Peningkatan Ketahanan Pangan Nasional'. *Jurnal Sositologi*. No. 1. Hal. 59-67

Bahri, Husnul. 2016' Pengelolaan Pendidikan dan Pembelajaran Berbasis Potensi Lokal'. *Jurnal Studi Islam dan Kemasyarakatan*. No. 1. Hal. 41-48

Damara, Cherrya, dkk. 2015' Strategi Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Keluarga (PPMK) di Kota Bandar Lampung' *Jurnal JIIA*. No.3. Hal. 315-322

Dwiyanto, Bambang Sugeng dan Jemadi. 2013' Pemberdayaan Masyarakat Dan Pengembangan Kapasitas Dalam Penanggulangan Kemiskinan Melalui PNPM Mandiri Perkotaan'. *Jurnal Maksipreneur*. No. 1. Hal. 36-61

Harahap, Friska Indria Nora. 2017' Pemberdayaan Masyarakat Pemulung Sampah Sungai Citarum Melalui Koperasi Bangkit Bersama' *Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat*. No. 2. Hal. 121-132

Hatu, Rauf A. 2010' Pemberdayaan dan Pendampingan Sosial Dalam Masyarakat'. *Jurnal Inovasi*. No.4. Hal. 240-254

Husna, Nurul. 2014' Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial'. *Jurnal Al-Bayan*. No. 29. Hal. 45-58

Harahap, Friska Indria Nora. 2018' Dampak Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Biogas Dalam Mewujudkan Kemandirian Energi'. *Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat*. No. 1. Hal. 41-50

Imron, Ibrahim, dkk. 2014' Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama'. *Jurnal Administrasi Publik*. No. 3. Hal 485-491

Kusrina, Novira, dkk. 2017' Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Lokal di Desa Jeruju Besar Kecamatan Sungai Kakap'. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*. No. 2. Hal. 139-150

Miradj, Safri dan Sumarno. 2014' Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Proses Pendidikan Non Formal Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Halmahera Barat'. *Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat*. No.1. Hal. 101-112

- Nazarullai, Fikri, Handika, Desyanty, Ellyn Sugeng. 2017' Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Ekowisata Lepen Adventure'. *Jurnal Pendidikan*, No. 8. Hal. 1071-1076
- Noor, Munawar. 2011. Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah CIVIS*,1(2)
- Nurfitriyana, dkk. 2012'Pelayanan Publik Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Sosial'. *Jurnal Administrasi Publik*. No. 3. Hal. 564-570
- Raharjo, Tri Joko, dkk. 2016' Peran Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dalam Menanggulangi Kemiskinan melalui Pendidikan Nonformal di Jawa Tengah'. *Jurnal of Nonformal Education*. No.1. Hal. 22-38
- Suhastyo, Arum Asriyanti. 2017' Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pelatihan Pembuatan Pupuk Kompos'. *Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*. No.2. Hal. 63-68.
- Suradi, 2007. Pembangunan Manusia, Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial:Kajian Tentang Kebijakan Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*. No.3. Hal. 1-11
- Sururi, Ahmad. 2015' Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pembangunan Onstruktur Perdesaan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak'. *Jurnal Administrasi Negara*. No. 2. Hal. 1-25
- Widjajanti, Kesi. 2011' Model Pemberdayaan Masyarakat'. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. No.1. Hal. 15-27

C. Referensi Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 tahun 2016 yaitu tentang Penanggulangan Kemiskinan Kota Semarang
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kelurahan
- Peraturan Walikota Nomor 22 tahun 2018 tentang petunjuk Pelaksanaan Kampung Tematik
- Undangun-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

D. Referensi Internet

- Antoni, Ahmad. 2019. 48.00Warga Kota Semarang Masih Menganggur Didominasi Lulusan SMA.

<https://jateng.sindonews.com/read/3788/1/48000-warga-kota-semarang-masih-menganggur-didominasi-lulusan-sma-1554879879>. (2 Jan.

2020).

E. Referensi Skripsi, Disertasi

Pratiwi, Hesti. 2017. Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Desa Wisata Mandiri Di Desa Wnurejo Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang. Pendidikan Luar Sekolah. Fakultas Ilmu Pendidikan. Universitas Negeri Semarang.

Sofiandi, Mohammad. 2015. 'Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Lingkungan Di Desa Gilangharjo Pandak Kabupaten Bantul (Studi Kasus Lembaga Community Develoment Yayasan Suara Bhakti)'. *Disertasi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga